

DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021 DESA AIR RUAI KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA

Prayodi Raharjo

NPP. 30.0393

Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: prayodiraharjo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: David E. Mayor, S.Sos., M.BA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of determining the Village Budget (APBDes) in Air Ruai Village, Pemali Sub-district, Bangka Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and find out the problems of local political dynamics in the determination of the APBDes that are detrimental to the people of Air Ruai Village. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that there are many problems that occur related to the dynamics of local political power in determining the APBDes because there are many interests that occur in it, causing problems regarding the Air Ruai village head who is too selfish without seeing the voice of the community. **Conclusion:** The technical guidelines in this APBDes have not yet been provided by the Pemali Sub-district for Air Ruai Village so that the Air Ruai Village Head does not coordinate with the Pemali Sub-district and in determining this APBDes the Village Head determines that the budget is used for the construction of the previous year's plan because the construction is not finished in the current year. The technical head of Air Ruai Village and the community regarding the determination of the APBDes did not find a middle ground because the Village Head prioritized personal interests and lack of closeness to the local community so that there were many problems in Air Ruai Village regarding the APBDes. The attitude of the Mass Media in determining the APBDes is to always update the latest developments regarding the problems that occur in determining the APBDes so that the people of Air Ruai Village know about it.

Keywords: Political Dynamics, District, and APBDes

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui permasalahan dinamika politik lokal didalamnya terkait penetapan APBDes yang merugikan masyarakat Desa Air Ruai. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah banyak terjadinya permasalahan yang terjadi terkait dinamika politik lokal kekuasaan dalam penetapan APBDes karena banyak kepentingan yang terjadi didalamnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kepala desa Air Ruai yang terlalu mementingkan diri sendiri tanpa melihat suara masyarakat. **Kesimpulan:** Petunjuk Teknis dalam APBDes ini belum adanya juknis yang diberikan oleh Kecamatan Pemali untuk Desa Air Ruai sehingga Kepala Desa Air Ruai tidak berkordinasi dengan Kecamatan Pemali dan dalam Penetapan APBDes ini Kepala Desa menetapkan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan rencana tahun sebelumnya dikarenakan pembangunan tersebut tidak jadi pada tahun sekarang. Teknis Kepala Desa Air Ruai dan masyarakat terkait penetapan APBDes ini tidak mendapatkan jalan tengah dikarenakan Kepala Desa mementingkan kepentingan pribadi dan kurangnya kedekatan dengan masyarakat setempat sehingga banyak terjadi permasalahan yang ada di Desa Air Ruai mengenai APBDes. Sikap Media Massa dalam penetapan APBDes yaitu selalu update perkembangan terbaru mengenai permasalahan yang terjadi dalam penetapan APBDes agar diketahui oleh masyarakat Desa Air Ruai. **Kata kunci:** Dinamika Politik, Kepala Desa, dan APBDes

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian dan seluruh administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat otonomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah daerah berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerahnya melalui peningkatan baik itu pelayanan, peran, dan sumber daya masyarakat. Pemerintah daerah pun dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing daerah serta memperhatikan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan budaya lokal suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan suatu negara pembangunan harus dimulai dari pemerintah pada tingkat yang terkecil hingga terbesar, dalam hal ini dimulai dari desa atau kelurahan. Pada kenyataannya, pembangunan dalam suatu negara tidak terlepas dari pembangunan pada wilayah yang lebih kecil di dalam negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien, pembangunan dituntut dapat mengembangkan dan memajukan masyarakat dan bertujuan untuk pemerataan pembangunan dalam tujuan nasional pemerintah daerah. Masyarakat yang merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan dituntut aktif dan memiliki peran dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kepribadian bangsa menggambarkan masyarakat diseluruh daerah tanah air untuk diberikan kebebasan dalam mengatur, mengelola dan membangun daerah setempat. Pemerintah daerah pada hakikatnya mempunyai kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dimana pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut bisa mandiri dalam meningkatkan dan mengembangkan suatu pembangunan tanpa dibantu oleh pemerintah pusat.

Dana Desa (DD) pada hakikatnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hibah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerangkan bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mengelola anggaran desa baik itu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabkan harus dikelola dengan berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif. APBDes biasanya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dimana dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menjadi tugas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dengan keputusan yang harus ditetapkan oleh kepala desa. Dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa diperlukan pengawasan dan pengendalian yang optimal dan transparan, sehingga tugas kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini tidaklah mudah. Pada dasarnya kepala desa dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pemerintahan desa dan harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat desa serta menjadi kepala desa yang humoris lebih baik terhadap masyarakat setempat. Dengan adanya APBDes ini masyarakat berharap adanya pembaruan dalam pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang dalam tingkat kehidupan masyarakat jauh dari kemiskinan. Kemajuan desa dilihat dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Dalam hal pembangunan ini juga diperlukan perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, serta kerjasama dari masyarakat desa. Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung tercatat memiliki 6 desa yaitu diantaranya Desa Pemali, Desa Penyamun, Desa Air Ruai, Desa Air Duren, Desa Karya Makmur, Desa Sempan (*data diolah oleh peneliti*). Saat ini untuk mengoptimalkan APBDes di Kecamatan Pemali, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum seperti membangun puskesmas di desa, membangun sekolah, serta membangun tempat-tempat wisata untuk meningkatkan budaya lokal di desa dan harus diajukan ke bupati/walikota untuk disetujui. Diharapkan setiap desa jumlah anggaran APBDesnya harus memiliki jumlah yang merata disetiap desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan APBDes di setiap desa di Kecamatan Pemali mengalami penurunan ditahun 2021. Penurunan ini diindikasikan karena kurang penyerapan dari penyelenggaraan desa terhadap wilayah tersebut. Perumusan APBDes ini masih banyak kepala desa tidak mengikut sertakan masyarakat dalam pembahasan anggaran tersebut karena digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan kelompok tertentu. Sehingga APBDes banyak yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Maka dari itu perlu ditindak lanjuti masalah tersebut. Dalam penetapan APBDes hingga saat ini, masih banyak kepala desa seringkali tidak mengikuti sertakan masyarakat dalam pembahasan anggaran diindikasikan karena digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan kelompok tertentu. Desa Air Ruai yang dimana anggaran tahun 2020 lebih besar dari anggaran tahun 2021 mengalami penurunan ditahun berikutnya hal ini memungkinkan bahwa pemerintah desa tidak bisa mengelola dengan baik APBDesnya sehingga terjadi pemotongan anggaran dalam jumlah yang besar untuk pembangunan desa. Banyaknya pengaruh dinamika politik dalam penetapan APBDes ini membuat campur tangan berbagai pihak demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang dimana banyak berbagai pihak yang mengikuti penetapan APBDes ini yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa tetapi dipergunakan untuk hal yang tidak semestinya. Banyak polemik perdebatan dalam penetapan APBDes ini guna untuk mengembangkan desa dan kebutuhan masyarakat desa dalam hal sarana dan prasarana umum. Perlunya Musyawarah Pembangunan Desa (*musrembangdes*) untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di desa dan dirapatkan oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di desa. Sehingga dalam hal ini akhirnya rancangan APBDes yang disahkan sering kali tidak efektif dan efisien.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang analisis maupun pelaksanaan program pengalokasian anggaran desa. Penelitian oleh Novi Yuniati (2019) yang berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Berencana (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menemukan hasil bahwa

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Karangjaladri terlaksana dengan baik walaupun masih kurang baiknya pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa serta kurangnya pemerintah desa menanggapi usulan masyarakat yang mewakili masing-masing wilayah sehingga belum dapat mengakomodir setiap usulan dari masyarakat. Penelitian oleh Dizzy Asrinda Ramadhani dkk (2019) yang berjudul Analisis Rasio untuk menilai Kinerja APBDes (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan) menemukan hasil bahwa kinerja Pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan keserasian masih kurang optimal, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam mengelola PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek pertumbuhan sudah cukup baik dilihat dari total pendapatan, belanja rutin, dan belanja modal 2015-2017. Kinerja pemerintah desa sudah baik dan efisien, sedangkan dari aspek efektivitas kinerja desa sudah cukup efektif. Penelitian oleh Paulus Israwan Setyoko (2011) yang berjudul Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) menemukan hasil bahwa tujuan penelitian untuk mengkaji Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Meningkatkan keberhasilan program ADD, maupun program pembangunan perdesaan lainnya, peningkatan kemampuan administrative aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administrative ini dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada analisis rasio keuangan desa. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Novi Juniati tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Dinamika Politik Lokal oleh CSIS (2001). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan politik pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Menganalisis pemerintah desa dalam penetapan APBDes di desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dan merumuskan faktor-faktor penghambat penetapan APBDes di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penetapan APBDes di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penetapan APBDes di Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Pegawai Kecamatan Pemali dan Perangkat Desa Air Ruai, Masyarakat serta Anggota Pemuda Karang Taruna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Dinamika Politik Lokal oleh CSIS (2001) bahwa politik lokal adalah dinamika institusi politik di daerah dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dan memfungsikan peran yang penting oleh masing-masing institusi. Teori ini didukung dengan dua variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Institusi Politik dan Kapasitas dan Kapabilitas. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Institusi Politik

Institusi politik dikategorikan menjadi struktur politik dan infrastruktur politik. Infrastruktur dalam hal ini meliputi kecamatan, kelompok kepentingan, media massa. Dalam konteks pengertian ini adalah kecamatan, kepala desa, kelompok kepentingan, dan media massa dalam melaksanakan pembangunan melalui interaksi dan dinamika peran. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan maka keseluruhan institusi politik atau komponen politik tersebut akan mempengaruhi mutu pembangunan. Kecamatan selaku perangkat daerah mempunyai tugas yaitu sebagai pelayan umum masyarakat kecamatan yang meliputi berbagai desa. Yang dimana dalam penetapan APBDes ini kecamatan tidak berperan penting dalam APBDes tetapi memiliki peran vital yaitu mengawasi dan membina pengelolaan keuangan desa dengan baik dan efisien yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan permendagri untuk melaksanakan penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa. kecamatan hanya membina dan mengawasi pengelolaan APBDes sedangkan desa yang menetapkan APDes. Menurut wawancara bahwa yang dijadikan pedoman dari kepala desa karena desa berpatokan kepada Kecamatan Pemali selaku pemerintah daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak untuk menetapkan APBDes Desa Air Ruai bersama Kepala Desa Air Ruai beserta masyarakat desa. Kegiatan yang biasa dilakukan di desa seperti musrembangdes dalam perencanaan pembangunan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan kemudian merealisasikan pembangunan desa sesuai usulan dan masukan dari masyarakat maupun anggota BPD.

Bangka Pos selaku komunikasi massa yang membahas berbagai macam informasi aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka terutama menyorot permasalahan yang di Kabupaten Bangka yang kemudian dibuat dalam artikel ataupun informasi terbaru melalui televisi, majalah, maupun media sosial lainnya. Bangka Pos dibantu dengan perangkat daerah Kecamatan Pemali beserta perangkat desa mengikuti perkembangan penetapan APBDes desa Air Ruai guna untuk melihat seberapa jauh desa ini bisa berkembang dan maju juga bisa dibuat materi dalam artikel mereka.

3.2. Kapasitas dan Kapabilitas

Kapasitas dan kapabilitas terkait Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Air Ruai ini pelayanan desa dalam penetapan APBDes ini dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala Desa harus bijak dan tegas dalam penetapan APBDes ini agar terciptanya kinerja yang baik dan disiplin untuk kemajuan desa serta perkembangan kehidupan masyarakat Desa Air Ruai. Kepala Desa dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Air Ruai terutama usulan dan masukan terhadap pembangunan desa Air Ruai maka dari itu perlunya bantuan dan juga dukungan dari masyarakat desa kepada kepala desa untuk bisa memajukan desa Air Ruai. Peran kecamatan dan Desa terkait Penetapan APBDes ini memantau

perkembangan agar berjalan dengan baik dan transparan untuk menghindari terjadi masalah yang tidak diinginkan. Maka dari itu desa memilih dan melakukan secara musyawarah melaksanakan Penetapan APBDes ini secara terbuka dengan masyarakat desa.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dianalisis terkait jawaban yang dihasilkan bahwa kecamatan hanya membina dan mengawasi pengelolaan APBDes sedangkan desa yang menetapkan APDes. Menurut wawancara bahwa yang dijadikan pedoman dari kepala desa karena desa berpatokan kepada Kecamatan Pemali selaku pemerintah daerah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya peraturan yang dibuat oleh Kecamatan untuk melaksanakan penetapan APBDes yang dijadikan pedoman untuk kepala desa yang berlandaskan pada kondisi dan situasi masyarakat desa setempat. media massa Bangka Pos ini sangat berpengaruh pada penetapan APBDes di Desa Air Ruai agar terciptanya kejelasan dan transparan dalam penetapan APBDes agar anggaran tersebut berguna buat masyarakat serta pengembangan desa. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam penetapan tersebut maka akan diinformasikan melalui media sosial yang bisa diketahui masyarakat luas dan kemudian bisa ditindak lanjuti permasalahan tersebut. peran pegawai desa dalam evaluasi penetapan APBDes ini mereka kurang mengetahui perkembangan penetapan APBDes dan menyerahkan semuanya ke Kepala Desa padahal mereka sudah diberikan bimbingan teknis mengenai APBDes. kewenangan Kecamatan dan Desa dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini tetap mempunyai tupoksi masing-masing pemerintahan dan kecamatan juga tetap memantau perkembangan dan juga kewenangan desa bisa menetapkan APBDes sesuai dengan kordinasi dengan BPD serta masyarakat.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penetapan APBDes yaitu Kepala Desa yang tidak bijak dalam penetapan APBDes dan juga pegawai desa di kantor Desa Air Ruai tidak mengetahui perkembangan penetapan APBDes

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Bangka dapat ditarik kesimpulan bahwa Petunjuk Teknis dalam APBDes ini belum adanya juknis yang diberikan oleh Kecamatan Pemali untuk Desa Air Ruai sehingga Kepala Desa Air Ruai tidak berkordinasi dengan Kecamatan Pemali dan dalam Penetapan APBDes ini Kepala Desa menetapkan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan rencana tahun sebelumnya dikarenakan pembangunan tersebut tidak jadi pada tahun sekarang. Teknis Kepala Desa Air Ruai dan masyarakat terkait penetapan APBDes ini tidak mendapatkan jalan tengah dikarenakan Kepala Desa mementingkan kepentingan pribadi dan kurangnya kedekatan dengan masyarakat setempat sehingga banyak terjadi permasalahan yang ada di Desa Air Ruai mengenai APBDes. Sikap Media Massa dalam penetapan APBDes yaitu selalu update perkembangan terbaru mengenai permasalahan yang terjadi dalam penetapan APBDes agar diketahui oleh masyarakat Desa Air Ruai.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki oleh penulis sehingga data yang informasi yang diperoleh belum maksimal dan belum bisa melengkapi keseluruhan dari aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Bangka, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- YUNIATI, N. (2019). PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 174-186.
- Asrinda Siswi Ramadhani, D. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Pada Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember).
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 11(01), 14-24.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa